

RINGKASAN

Ode Tria Tambunan **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perampasan
190510074 Barang Secara Paksa yang Dilakukan Oleh Rentenir
(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. dan Johari, S.H., M.H.)**

Perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir, dimana sampai saat ini masih terjadi di masyarakat merupakan tindak pidana. Rentenir menjerat nasabahnya agar melakukan perjanjian hutang piutang dengan bunga tinggi (riba) yang dapat memberatkan nasabahnya dalam membayar angsuran, sehingga jika nasabah telat membayar angsuran maka timbul perbuatan tidak menyenangkan yang akibatnya berupa perampasan. Berhubung tidak adanya peraturan secara khusus mengenai usaha pinjam-meminjam uang bukan bank dan tidak melarang adanya praktik rentenir di dalam masyarakat, maka akan tetap timbul perbuatan perampasan barang di kalangan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apa hukuman pidana terhadap rentenir sebagai pelaku, perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang secara paksa yang dilakukan oleh rentenir dan apa yang menjadi hambatan serta solusi dalam hal penanggulangan tindak pidana perampasan barang secara paksa.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh dari studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa rentenir tidak bisa dipidana karena tidak ada Undang-Undang khusus yang mengaturnya kecuali terdapat unsur pidana didalamnya, tetapi apabila rentenir melakukan perampasan barang milik nasabah secara paksa, dan jika terbukti, individu yang meminjamkan uang dapat dikenakan Bab XXIII Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tidak ada aturan spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap korban perampasan barang oleh rentenir, karena tidak adanya sanksi hukum serta perjanjian utang-piutang ini hanya secara lisan saja, namun bisa dijadikan acuan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hambatan masyarakat yang sulit terlepas dari rentenir karena adanya rasa ketergantungan yang sudah menjadi budaya, beberapa korban tidak melapor, karena masih belum paham prosedur dalam membuat laporan, dan ketika sudah ada yang melaporkannya kepada pihak aparat kepolisian serta ke pihak lain yang berkepentingan, di dapati bahwa hasilnya tidak berhasil. Solusinya, nasabah akan mendapatkan pengetahuan dan berani dalam melaporkan kasusnya kepada aparat kepolisian, pemerintah dapat melakukan upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perjanjian di atas surat sebagai bukti perjanjian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak

Disarankan kepada Pemerintah Daerah mengeluarkan peraturan yang mengatur keberadaan usaha pinjam-meminjam uang bukan bank di dalam masyarakat, memperketat upaya pencegahan dan mengawasi usaha pinjam-meminjam, melarang adanya praktik rentenir, mencabut izin jika usaha pinjam-meminjam uang tersebut didapat adanya praktik rentenir dan sebaiknya masyarakat harus menjauhi perjanjian dengan rentenir karena perjanjian tersebut dapat menimbulkan dampak pidana salah satunya perampasan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perampasan, Rentenir.

SUMMARY

Ode Tria Tambunan *Legal Protection for Victims of Forced Confiscation of
190510074 Goods by Loan sharks*

(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. and Johari, S.H., M.H.)

The forcible seizure of property by the renter, which to this day is still happening in society, is a criminal offence. The renter is obliged to make a debt agreement with a high interest, which can make it difficult for the renter to pay the payment, so that if the customer is late paying the payment there will be an unpleasant act which will result in a robbery. In the absence of specific regulations on non-bank lending and not prohibiting the existence of retirement practices in society, there will still be acts of confiscation of goods in the community.

The objective of this study is to find out what criminal punishment is imposed on the tenant as the perpetrator, the legal protection of the victim of the forcible seizure of goods by a tenant and what constitutes the obstacles and solutions in terms of combating the criminal act of forcibly seizing goods.

This research uses normative juridic methods with a qualitative approach and data obtained from library studies.

The results of this study prove that the pensioner cannot be punished because there is no special law governing him unless there is a criminal element in it, but when the rentor commits the forced seizure of the property of the customer, and if proven, the individual who borrowed money can be subjected to Chapter XXIII Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code Book (KUHP). There are no specific rules concerning the legal protection of the victims of the seizure of goods by the tenant, as there is no legal sanction and these debt agreements are only oral, but can serve as a reference to legal protection provided for in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Basic Act. Some of the victims did not report, because they still did not understand the procedures in reporting, and when someone had already it to the police and other interested parties, it was found that the results did not work. The solution, the customer will gain knowledge and courage in reporting his case to the police, the government can undertake an effort to educate the public about the importance of the agreement on the letter as proof of a valid agreement and can be held accountable by each party.

It is recommended to the Regional Government to issue regulations that regulate the existence of non-bank money lending enterprises in the society, tighten the preventive efforts and oversee the loan-lending enterprise, prohibit the presence of the practice of renting, revoke the permission if the attempt to borrow such money has been obtained by the renting practice and it is better for the public to avoid the agreements with the renter because such agreements can cause criminal effects one of the kidnapping.

Keywords: *Legal Protection, Confiscation, Loan sharks.*